

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Al Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Widia Pustaka.
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, New York: W.W. Norton and Company.
- Mahmudah Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mohammad Ali, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press. Nurdin, dkk., 2017, *Hukum Perikanan*, Malang: Universitas Brawijaya Press. Nurhati, 2023, *Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove*, Jakarta: CIFOR
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Romimohtarto, K. dan Juwana, S., 2005, *Biologi Laut: Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut*, Jakarta: Djambatan.
- Roni Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bogor: Ghalia

Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

———, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2009).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023)

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Nomor 16 tahun 2022 tentang pengelolaan Lobster (*panulirus* spp.), Kepiting (*scylla* spp.), Dan Rajungan (*portunus* spp) di wilayah negara republik indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 mengatur tentang pengelolaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan, Jakarta, 2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) (Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024)

Kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia, *pedoman pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan* (Jakarta : kkp, 2021)

C. Jurnal/Skripsi

Adhitya Nini Rizki Apriliana, 2025, “Pendekatan Ekosistem Berkelanjutan dalam Konservasi Plasma Nutfah Sebagai Bentuk Perlindungan Benih Lobster di Sentra Buidaya Lobster Teluk Jukung Lombok Timur”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.346>

Ahmad Faiz, Edward Danakusumah, dan Yudha Lestira Dhewantara, 2021, “Efektivitas kepadatan benih lobster air tawar (*Cherax quadricarinatus*)

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada sistem resirkulasi”, *Jurnal Ilmiah Satya Minabahari*, Vol. 6, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.53676/jism.v6i2.148>

Aldino Attariqi, 2025, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Hukum Ditpolairud Polda Bengkulu”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. <https://repository.umb.ac.id/1222/>

Ayu Veronika, Kabib Nawawi, dan Erwin Erwin, 2020, “Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan baby Lobster”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>

Avid Wahyudi, Ibrahim Ahmad, dan Roy Marthen Moonti. 2024 "Analisis tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum angkutan antar provinsi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4 <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/983>

Dhea Nur Ananda, 2019, “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Wilayah Perairan Riau”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1392>

Erlania, Radiarta I. N., dan J. Haryadi, 2016, “Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok”, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 8, No. 2. <https://www.researchgate.net/publication/312199498>

Irfannur, dkk., 2017, “Komposisi Hasil Tangkapan dan Ukuran Lobster dengan jaring insang di Perairan Kabupaten Aceh Jaya”, *Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan*, Vol. 4, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.29244/core.1.2.211-223>

M. Yasin Al arif, 2019, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>

Moh. Zuhdy Alghiffari, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Benih Lobster Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10709/>

Mukhamad Fahminudin Alfiandi, 2023, “Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Benih Lobster Tanpa Surat Izin”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *Jurnal Hukum*, Vol. 29, No. 1. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19458>

Padirsan Jamba dan Zuhdi Arman, 2025 “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Kota Batam”, *Semarang Law Review*, Volume 6 Nomor 1, <https://journals.usm.ac.id>.

Pusat Studi Hukum Perikanan, 2023, “Kajian Implementasi Penegakan Hukum

Perikanan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Perikanan*, Vol. 5, No. 2. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/558/409>

Safrida, T. Makmur, dan Hafid Fachri, 2015, “Peran Penyuluh Perikanan dalam Pengembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Aceh Utara”, *Agrisep*, Vol. 16, No. 2. <https://www.neliti.com/publications/13197/>

Witomo, C.M., dan Nurlaili, N., 2015, “Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Benih Lobster di Perairan Lombok”, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 5, No. 1. <https://doi.org/10.22146/jfs.64415>

D. Website

Artikel CNN Indonesia "Syarat Penangkapan Benih Lobster untuk Budi Daya" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210713124144-92-666974/syarat-penangkapan-benih-lobster-untuk-budi-daya>

Dedi Sutomo, *Polres Lampung Selatan Gagal Galkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar*, <https://lampung.tribunnews.com/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagal-galkan-penyelundupan-benihlobster-senilai-rp-128-miliar>

Kuncoro Budi, “Ini Dia Aturan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Yang Boleh Ditangkap”, [Http://Villagerspost.Com/Todays-Feature/182/](http://Villagerspost.Com/Todays-Feature/182/)

Supono. “Pengelolaan Sumber Daya Lobster” <https://www.unila.ac.id/pengelolaan-sumber-daya-lobster/>